

PEMBERDAYAAN PETANI : STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI PEDESAAN

Oleh:
HASTUTI
FIS, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Petani yang selama ini hidup dalam kondisi yang memprihatinkan semakin diperparah dengan keharusan menanggung dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sarana produksi harus diperoleh dengan harga yang semakin sulit dijangkau petani. Kebijakan pemerintah menaikkan harga dasar produksi pertanian terutama HDG (harga dasar gabah) justru menyulitkan petani karena petani tidak memiliki posisi tawar. Petani di Indonesia sebagian merupakan petani gurem dengan luas lahan garapan yang sempit, pendapatan rendah, pendidikan tidak memadai yang menjadi penyebab mereka dilanda kemiskinan.

Guna meningkatkan kesejahteraan hidup, petani harus mencari alternatif sumber pendapatan dengan pemberdayaan petani agar tidak selalu terpinggirkan dan mampu secara mandiri dan proaktif memanfaatkan dan mengembangkan sektor pertanian. Sektor pertanian dalam suasana keterpurukan perekonomian secara nasional ternyata memiliki resistensi di dalam menopang kehidupan petani meskipun tidak terlalu menjajikan. Kendala yang dihadapi adalah karakteristik petani Indonesia yang sebenarnya belum siap melakukan terobosan menghadapi pasar yang semakin kompetitif.

Pemberdayaan petani di pedesaan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran lembaga sosial kemasyarakatan, peningkatan pendidikan dan penguasaan pengetahuan dan teknologi tepat guna maupun pemindahan penduduk ke lokasi lahan yang lebih luas. Pemerintah berfungsi hanya sebagai fasilitator dan pendamping yang berfungsi sebagai mediator, motivator sekaligus fasilitator dan dinamisator sehingga petani didorong lebih aktif tidak hanya menunggu instruksi, petani harus dilibatkan dalam perumusan, persiapan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Pemberdayaan petani melalui kebijakan yang secara proposional mendorong kemajuan sektor pertanian yang memihak kepada petani, agar petani terbebas dari kemiskinan dan memiliki pendapatan yang semakin meningkat. Reformasi pola pikir petani agar dinamis, mandiri dan mampu mengelola usaha taninya secara aktif sehingga peka terhadap perkembangan pasar merupakan langkah awal yang harus diperhatikan guna meningkatkan pendapatan sebagai strategi peningkatan kesejahteraan petani.

(Kata kunci : Pemberdayaan, Petani, Peningkatan kesejahteraan, Pedesaan)

Abstract

The farmers who so far have been living in a desperate condition undergone worse condition because they have to face the impact of economic crisis which has begun since the decrease of rupiah exchange towards the USA \$, because the price of fertilizer is so high that the farmers can not buy it. The government policy by increasing the basic prices of agricultural production, especially the basic price of rice make farmer's condition is more difficult because they do not have bargaining position. Part of Indonesian farmers are the lower who have only a narrow land, lower income, and less education that make them live in poverty.

In order to increase their welfare, the farmers should try to find alternative sources of income by empowerment so that they will be able to use and develop this agricultural sectors. Empowerment the farmers so select the commodity of agricultural production which is oriented to market need, such as with developing the agrindustry. In fact, the agricultural sector in the nationally economic decrease has resistance for supporting the farmer's life, although it is not much prospective. The difficulty that appears is that the characteristic of Indonesian farmers who have not been ready yet to face the competitive market.

Empowerment of farmers in rural areas can be done by optimizing the role of social institution, increasing the education level and mastering science and technology, or through transmigration programs. The government only serves as a facilitator and guide which has mediator function motivator and also facilitator and dinamisator, so that the farmers are encouraged to be more empowerment and to be involved in designing. Preparing and executing the empowerment programs. The farmers empowerment by a policy which encourages the development of agricultural sector proportionally and gives advantages to the farmers welfare in order to free them from poverty and have higher income. The reformation of the farmers frame of mind which is expected to enable them manage their farming actively so that they have sensitivities of market development is an important beginning step to increase their incomes is a strategy of increasing rural welfare.

(Keyword : farmers empowerment – Increasing rural welfare)

Pendahuluan

Sumber pendapatan penduduk pedesaan di Indonesia sampai saat ini sebagian besar masih ditopang dari kegiatan pertanian. Keterpurukan perekonomian secara nasional ternyata semakin menekan kehidupan sosial ekonomi petani di pedesaan, meskipun dampak dari kejayaan perekonomian secara nasional sebenarnya belum sempat menyentuh kehidupan petani secara substansial. Perbaikan taraf hidup petani masih sebagai impian karena selama ini petani hanya sebagai objek kebijakan yang beralih pada pengembangan teknologi di sektor pertanian (misal revolusi hijau yang berdampak memarginalkan petani). Perubahan kebijakan yang berorientasi kepada lapisan bawah baru sebatas slogan sehingga belum mampu memperbaiki nasib dan kehidupan petani.

Sistem pertanian modern yang selama ini dikembangkan di Indonesia memaksa petani untuk mengadopsi cara bertani yang sarat dengan muatan teknologi dan padat modal. Sistem pertanian model ini sangat bergantung pada pasokan sarana produksi yang berasal dari industri modern. Pemenuhan kebutuhan sarana produksi guna kelancaran kegiatan usaha tani mereka seperti pupuk, pestisida, pemenuhan kebutuhan pangan di luar beras serta hasil olahan lainnya tergantung pasokan dari luar yang harus diperoleh dengan harga mahal. Kondisi ini turut memperparah petani dengan tekanan yang semakin erat karena petani terpaksa harus mengeluarkan biaya sedangkan nilai tukar produksi pertanian semakin rendah. Beberapa komoditi untuk pemenuhan kebutuhan hidup tidak diupayakan secara mandiri oleh petani bahkan petani tidak berdaya untuk menentukan harga produksi pertanian karena banyak terkait dengan lembaga lain.

Kejayaan perekonomian nasional mengalami tekanan sejak medium 1997 hingga saat ini (tahun 2000). Upaya pemulihan terus dilakukan meskipun belum mampu secara signifikan membangkitkan pertumbuhan perekonomian. Kondisi petani yang memprihatinkan semakin diperparah dengan keharusan menanggung dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan akhir-akhir tahun ini karena sarana produksi harus diperoleh dengan harga

yang semakin sulit dijangkau petani. Terlebih lagi pola kebijakan pemerintah dengan menentukan harga dasar produksi pertanian terutama HDG (harga dasar gabah) semakin menyulitkan petani karena petani tidak memiliki posisi tawar sedangkan subsidi pupuk telah dicabut.

Petani gurem dengan lahan garapan kurang dari 0,5 ha per rumah tangga saat ini mencapai 10,94 juta. Hal ini menakutkan bahwa belum sampai satu dasa warsa berikutnya lahan garapan sebagian mereka menjadi kurang dari 0,25 ha per rumah tangga (BPS, 1995,1999). Jumlah petani gurem terus meningkat bahkan di Jawa petani semakin terdesak sehingga tidak memiliki lahan garapan. Rata-rata 17.000 ha areal persawahan hilang selama kurun waktu 16 tahun yang diubah untuk kegiatan nonpertanian. Apabila tidak dikendalikan tahun 2015 mendatang tidak ada lagi areal persawahan di Jawa (Bernas, 1997 dan Indra Ismawan, 1997). Petani (khususnya di Jawa) semakin terperangkap dalam kemiskinan. Apabila tetap bertahan pada kegiatan pertanian dengan lahan garapan yang semakin sempit mustahil petani dapat merasakan kehidupan secara layak.

Tanpa adanya kesempatan memperoleh sumber pendapatan lain dengan mengandalkan usaha tani, petani hanya dapat sekedar bertahan hidup sehingga semakin hari akan terhimpit kemiskinan yang berkepanjangan. Guna meningkatkan kesejahteraan hidup, petani harus mencari alternatif sumber pendapatan di luar sektor pertanian meskipun untuk memperolehnya semakin sulit. Beberapa dekade yang lalu fenomena inilah yang mendorong petani terutama dari golongan usia produktif beramai-ramai meninggalkan sektor pertanian melakukan urbanisasi ke perkotaan dengan tujuan dapat memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik meskipun tanpa modal keterampilan di luar sektor pertanian (Boot, 1991:16). Pedesaan menjadi wilayah yang semakin marginal dengan sumber daya yang semakin terbatas dan kurang dimanfaatkan secara optimal.

Petani yang Semakin Terpinggirkan

Keterpurukan petani dipicu oleh kolaborasi ketimpangan pertumbuhan perekonomian

nasional yang lebih memihak pada pemilik modal dan berorientasi kapitalis, pertumbuhan sektor ekonomi nonpertanian yang melaju pesat, sektor pertanian semakin menurun kemampuannya untuk menopang pemenuhan kebutuhan hidup serta semakin bertambahnya jumlah petani gurem (Uphadi, 1998). Meskipun petani hidup dalam ketidakberdayaan, petani pedesaan enggan untuk berspekulasi meninggalkan sektor pertanian dalam kondisi ekonomi yang serba sulit saat ini karena hanya akan mengakibatkan petani semakin sengsara. Berbeda dengan dekade 70-an adanya revolusi hijau dan pertumbuhan ekonomi industri yang cukup membanggakan telah mendorong petani mencari peluang pendapatan di kota. Kondisi ekonomi saat ini justru memaksa petani lebih memilih tetap bertahan dalam kemiskinan di pedesaan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada periode tahun 1998/1999 dapat mencapai nol persen bahkan dapat menjadi negatif. Sesuai dengan nota kesepakatan *Letter Of Intent (LOI)* yang dibuat pemerintah Indonesia dengan *IMF (Internationan Monetary Fund)* pertumbuhan ekonomi Indonesia dipatok minus 4 persen.

Tekanan ekonomi yang telah memukul berbagai kegiatan ekonomi menjadi lumpuh dan tidak mampu lagi diandalkan sebagai sumber pendapatan. Membengkaknya pengangguran akibat PHK (pemutusan hubungan kerja) dan kesulitan memperoleh kesempatan kerja membuat sebagian penduduk tidak memiliki pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Sri Adiningsih, 1997 dan Emil Salim, 1997). Pertumbuhan ekonomi yang negatif berdampak semakin sulitnya memperoleh kesempatan kerja sehingga petani tidak memiliki kesempatan memanfaatkan waktu luang mereka untuk memperoleh pendapatan guna memperbaiki taraf hidupnya. Selama pertumbuhan ekonomi dapat diandalkan ternyata banyak rumah tangga di pedesaan memanfaatkan sektor nonpertanian untuk menopang kebutuhan hidupnya (Booth, 1991 dan Hatta Sunanto, 1998).

Di perkotaan selama krisis ekonomi orang sangat sulit untuk mencari sumber pendapatan walaupun hanya sekedar untuk bertahan hidup. Pedesaan selama krisis ekonomi justru lebih mampu dijadikan sebagai tempat bertahan hidup karena kebutuhan hidup yang sederhana terutama

kebutuhan pangan dapat diperoleh secara langsung dari sektor pertanian (Gutomo Bayu Aji, 2000). Kebutuhan subsistem petani dapat diperoleh dengan memanfaatkan lahan misalnya untuk tanaman pangan dan lauk pauk. Pada tipe kehidupan seperti ini hanya sedikit memerlukan uang sebagai alat tukar sehingga krisis yang telah berlangsung selama ini tidak dirasakan (Indra Ismawan, 2000).

Terjadinya gejolak harga menjadikan petani semakin berat dapat hidup secara layak karena pendapatan yang diperoleh relatif tetap dan nilai tukar produksi pertanian semakin tertekan sedangkan pola usaha tani yang selama ini dikembangkan cenderung mempergunakan input pertanian secara kimiawi yang harus diperoleh dengan membeli. Input pertanian modern yang disosialisasikan selama ini ditentukan oleh harga pasar. Fluktuasi harga akan mempengaruhi daya beli petani. Apabila petani tidak memiliki kemampuan membeli sarana produksi pertanian dapat dipastikan akan berdampak pada kegiatan pertaniannya. Hikmah krisis secara positif seharusnya direspon dengan kembali ke sistem pertanian tradisional meskipun produktivitasnya berkurang tetapi dapat menekan biaya produksi sekaligus akrab lingkungan.

Langkah yang perlu dicermati adalah upaya peduli terhadap kehidupan petani yang menjadi semakin menderita akibat krisis ekonomi dengan menolong mereka agar tidak melampaui batas kemampuan bertahan hidup. Sudah saatnya untuk berpihak kepada petani sebagai penopang pemenuhan kebutuhan pangan dan bahan mentah selama ini sehingga kebijakan yang dibuat harus menyentuh pada struktur kehidupan mereka, suatu kebijakan yang diarahkan melalui transformasi pengembangan sektor pertanian agar produksi pertanian dapat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup petani yang memang marginal sejak awalnya. Sektor pertanian menjadi sumber pendapatan dan tempat menggantungkan kehidupan penduduk pedesaan agar semakin membaik, representatif, mampu secara berkelanjutan sebagai pemasok bahan pangan dan bahan baku serta mampu dijadikan tumpuan petani untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Sungguh memprihatinkan petani masih harus menelan pil pahit untuk memperoleh perbaikan ekonomi karena kenaikan

harga dasar gabah ternyata diikuti dengan dicabutnya subsidi pupuk sebagai komponen strategis kegiatan pertanian (Indra Ismawan, 2000). Tekanan terhadap petani tidak hanya berhenti sampai di sini. Era pasar bebas menuntut petani harus bersaing dengan maraknya beras dan produksi pertanian impor dengan demikian petani harus menekan harga produksi pertanian lokal ke titik yang lebih rendah lagi dan menyebabkan petani terus merugi. Deretan tekanan petani masih ditambah dengan langkanya lahan pertanian karena semakin tergusur untuk berbagai kegiatan nonpertanian sehingga pemilikan dan penguasaan lahan pertanian per rumah tangga petani menjadi semakin sempit. Produktivitas petani menjadi rendah dengan produktivitas per kapita petani tercatat Rp 638.000 /tahun dibanding sektor industri yang mencapai Rp.2.710.000 per kapita pertahun, sektor perdagangan Rp.1.760.000 per kapita pertahun, perbankan Rp.14.529.000 per kapita pertahun (Indra Ismawan, 1998).

Memahami Kemiskinan Petani

Penduduk miskin di pedesaan tahun 1996 tinggal 15,3 juta. Ternyata pada tahun 1998 (satu tahun setelah krisis ekonomi) menguat menjadi 56,8 juta. Berarti penduduk miskin secara nasional pada tahun 1996 yang tinggal 15 persen pada tahun 1998 menjadi 80 persen penduduk yang harus terperangkap dalam kemiskinan (BPS, 1996). Kondisi perekonomian yang serba sulit telah memaksa sebagian terbesar kegiatan perekonomian di luar sektor pertanian gulung tikar. Namun demikian sektor pertanian sebagai sumber bahan mentah dan bahan pangan harus tetap dipertahankan. Dengan pendapatan petani semakin marginal upaya yang harus segera dibenahi adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan sehingga sektor pertanian tetap diminati secara berkelanjutan.

Himpitan yang dialami mulai dari nilai tukar yang menurun, sarana produksi yang kian tidak terjangkau, luas lahan garapan yang kian sempit menjadikan petani semakin terpuruk ke dalam ketidakberdayaan dan menelakung petani ke dalam kungkungan kemiskinan. Upaya membebaskan petani agar terlepas dari

kungkungan ketidakberdayaan terus dilakukan melalui berbagai paket mulai pengenalan intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi bahkan ekstensifikasi yang pada dasarnya merupakan upaya komprehensif guna mewujudkan harapan petani agar dapat hidup lebih layak.

Petani berlahan sempit yang rentan dengan kemiskinan tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan stok pemenuhan kebutuhan pangan sepanjang tahun. Kurang terjaminnya pemenuhan kebutuhan pangan sepanjang tahun terutama menghadapi masa paceklik menjadikan petani terdorong untuk mengusahakan lahan usaha taninya yang sempit hanya untuk usaha tanaman pangan. Alternatif untuk berspekulasi beralih ke tanaman nonpangan akan sulit diputuskan karena akan mengancam pemenuhan kebutuhan pangannya meskipun disadari bahwa langkah tersebut tidak pernah akan mampu mendongkrak kesejahteraan petani (Indra Ismawan, 2000). Pemberian berbagai bantuan berupa kredit lunak baik berupa uang atau sarana produksi yang pada hakekatnya ditujukan untuk mengangkat kehidupan petani dari lingkaran kemiskinan telah banyak digulirkan pemerintah. Tingginya resiko kegagalan usaha tani sehingga petani berlahan sempit yang memanfaatkan pinjaman guna meningkatkan produksi pertanian tidak mustahil akhirnya juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Kondisi demikian memaksa petani berlahan sempit dengan keterbatasan modal serta produksi usaha taninya yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara marginal tetap bertahan dalam kemiskinan yang berkepanjangan tanpa pernah memiliki peluang untuk memikirkan nasibnya agar memiliki kehidupan yang lebih baik melalui adopsi teknologi pertanian.

Tekanan ekonomi yang terjadi saat ini semakin parah karena perekonomian nasional yang dibangun selama ini ternyata memiliki landasan rapuh. Sektor pertanian yang menjadi landasan ekonomi seharusnya diperkokoh untuk menopang pembangunan ekonomi industri. Tanda-tanda pulihnya perekonomian nasional belum terasa hingga medium tahun 2000. Krisis semakin meluas bahkan krisis sembako yang ditandai melonjaknya harga dan semakin sulit dijangkau sebagian penduduk lapisan bawah. Bahkan beras sebagai kebutuhan pokok seolah

berubah menjadi barang mewah yang tidak setiap penduduk mampu menjangkaunya. Ironis bahwa harga beras di pasaran melonjak tetapi kondisi tersebut tidak memberi dampak positif sehingga mampu menaikkan taraf hidup petani. Kondisi ini justru membuat petani lebih memilih menahan hasil panenya untuk pemenuhan pangannya sementara kebutuhan lain di luar beras untuk memperolehnya semakin sulit karena keuangan yang tidak dimiliki petani. Ketidakmampuan keuangan melanda petani meskipun ada kenaikan harga dasar gabah karena kenaikan sarana produksi seperti pupuk dan obat-obatan membuat petani menjadi kian terpuruk. Petani menjadi sosok yang selalu ditimpa kekalahan demi kekalahan mulai dari faktor alam, kelembagaan serta penguasaan lahan yang semakin sempit (Greg Soetomo, 1997). Strategi yang perlu diterapkan adalah menempatkan sektor pertanian agar terhindar dari berbagai kebijakan yang meminggirkan petani mengingat sektor pertanian telah banyak mengalami tekanan berat untuk pengembangannya.

Sektor pertanian diakui sebagai sektor yang masih memegang peranan penting sebagai pemasok bahan mentah dan bahan pangan penduduk negeri ini sehingga kebijakan yang menyangkut sektor pertanian secara konsisten harus tetap diperhatikan. Pemerintah tetap mencanangkan sektor pertanian dalam struktur perekonomian nasional antara lain: (1) bahwa sektor ini masih menampung hajat hidup hampir seluruh lapisan penduduk di pedesaan dengan mampu menyediakan kesempatan kerja untuk sekitar 54 persen angkatan kerja yang ada, (2) sektor pertanian ternyata masih mampu menyumbang sekitar 22,3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), (3) sektor pertanian mampu menyediakan ragam penyediaan pangan bagi masyarakat secara umum, (4) bahwa sektor pertanian mampu mendukung sektor industri mulai hulu hingga hilir, (5) kekuatan sektor pertanian untuk melakukan ekspor produktivitasnya akan semakin meningkatkan kemampuan devisa negara menjadi lebih besar (Hatta Sunanto, 1998).

Pemerintah terus berupaya mengembangkan sektor pertanian agar mampu dijadikan penopang perekonomian nasional secara proposional meskipun kebijakan perekonomian

cenderung memihak pada sektor industri. Pengalaman masa lalu selama tiga dasa warsa dengan kebijakan yang meminggirkan sektor pertanian mengakibatkan sektor pertanian semakin ditinggalkan penduduk karena tidak mampu menjanjikan pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut akan menjadikan sektor pertanian mengalami involusi bahkan regresi yang dampaknya justru semakin memperluas kemiskinan (Pudjo Suharso, 1998).

Peningkatan pendapatan dari kegiatan pertanian akan berdampak pada perbaikan kesejahteraan petani sekaligus mendorong kemampuan daya beli masyarakat. Pendapatan sektor pertanian yang semakin baik akan mempengaruhi kekuatan perekonomian secara nasional mengingat sektor pertanian masih merupakan kegiatan utama di pedesaan hingga saat ini. Peningkatan kesejahteraan petani akan meningkatkan kekuatan perekonomian secara nasional. Kemampuan daya beli petani yang membaik berarti meningkatnya pangsa pasar produksi industri. Oleh karena itu perbaikan kesejahteraan petani merupakan pendekatan yang selayaknya diterapkan dalam pembangunan ekonomi.

Pemberdayaan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Petani

Kebijakan yang harus segera diberlakukan adalah upaya pemberdayaan petani karena cara tersebut diharapkan dapat menjadikan petani sebagai sosok kekuatan yang mampu mensiasati sektor pertanian sebagai sektor yang menarik dan memberikan harapan yang lebih baik demi kelangsungan kehidupan yang lebih sejahtera. Melonjaknya harga berbagai komoditi kebutuhan hidup termasuk sembilan bahan pokok (Sembako) menjadikan kehidupan petani di pedesaan semakin tertekan meskipun sejak semula mereka memiliki pola hidup sederhana karena kemampuan ekonomi yang hanya sekedar untuk bertahan hidup.

Pemberdayaan petani di pedesaan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran lembaga sosial kemasyarakatan, peningkatan pendidikan dan penguasaan pengetahuan dan teknologi tepat guna maupun pemindahan penduduk ke lokasi lahan yang lebih luas (Onny S. Priyono dan

AMW Pranarka, 1996). Kemajuan di pedesaan dengan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi pedesaan bergantung pada upaya meningkatkan pendapatan petani kecil dengan mengkaji sumber yang prinsipal tentang kemajuan pertanian meliputi perubahan teknik dan inovasi, kebijakan ekonomi pemerintah yang sesuai serta pengembangan lembaga sosial yang menunjang (Todaro, 1998). Kondisi tersebut memerlukan modernisasi struktur pertanian, menciptakan sistem penunjang yang efektif dan mengubah keadaan lingkungan pedesaan untuk memperbaiki taraf hidup. Pemberdayaan petani merupakan komponen strategis yang efektif di dalam menciptakan sektor pertanian di pedesaan agar petani mampu menjalankan sistem pertanian yang lebih maju.

Pemerintah yang selama ini lebih berperan sebagai instruktur seharusnya mulai dialihkan ke posisi yang berperan hanya sebagai fasilitator sehingga petani didorong lebih aktif, tidak hanya menunggu instruksi, petani harus dilibatkan langsung dalam perumusan, persiapan dan pelaksanaan program. Pendekatan seperti itu merupakan langkah yang diperlukan dalam pemberdayaan petani guna mewujudkan petani yang mandiri. Pemberdayaan petani agar mandiri memerlukan pendampingan yang berfungsi sebagai mediator, motivator sekaligus fasilitator dan dinamisator (Murwati B Rahardjo dan Sukardi Rinakit, 1996). Reformasi pola pikir petani agar secara mandiri mampu mengelola usahatani secara aktif sehingga peka terhadap perkembangan pasar merupakan langkah awal yang harus diperhatikan. Setiap kesempatan memperoleh sumber pendapatan yang lebih baik akan selalu dapat dimanfaatkan secara optimal apabila petani lebih diberdayakan sehingga peluang yang semakin terbuka untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup petani.

Pemberdayaan petani di pedesaan agar dapat hidup layak dengan tetap bertahan di sektor pertanian dapat dilakukan melalui sektor agroindustri (Didik J Rachbini, 1997). Petani diarahkan agar memilih komoditi jenis produksi pertanian yang diorientasikan kepada kebutuhan pasar tidak hanya terpaku untuk pemenuhan kebutuhan subsistemnya. Salah satu alternatif yang ditawarkan untuk menerobos pasar ekspor

adalah sektor agroindustri karena sektor ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam perbaikan ekonomi. Agroindustri sangat tergantung pada sektor pertanian sebagai penyedia bahan mentah. Dalam proses selanjutnya agroindustri diharapkan memiliki kaitan (*linkage*) yang panjang dan bervariasi yaitu perubahan bahan mentah mulai dari produksi yang modern yang merupakan peluang terbukanya kesempatan memperoleh pendapatan (Austin, 1991). Komponen di dalam agroindustri meliputi instrumen pembinaan mutu hasil pertanian, pengembangan pasar, pengembangan investasi, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan kelembagaan maupun kemitraan serta penyiapan sumberdaya manusia yang harus diperhatikan agar kegiatan tersebut dapat dijadikan andalan untuk mempertahankan kelangsungan perekonomian. (Departemen Pertanian, 1997). Kegiatan tersebut akan dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan apabila petani sebagai komponen utama memiliki kemampuan mengadopsi inovasi penunjang agroindustri lebih diberdayakan.

Jawaban atas solusi krisis ekonomi adalah bertumpu kembali di sektor ekonomi paling mendasar di Indonesia yakni mengembangkan sektor agraris (Didik J Rachbini, 1997). Kondisi pertanian yang telah dikembangkan selama ini ternyata belum mampu memberi harapan yang menggembirakan sehingga komponen yang terkait dalam sistem pertanian masih terlalu rapuh untuk mampu mengantisipasi dinamika pasar. Bahkan keterbatasan sumber daya manusia yang bergerak di sektor pertanian belum siap dan memiliki resistensi dalam meredam gejolak dibanding sektor nonpertanian (Gutomo Bayu Aji, 2000). Sektor pertanian dalam suasana keterpurukan perekonomian secara nasional ternyata memiliki ketangguhan di dalam menopang kehidupan petani meskipun tidak terlalu menjanjikan. Komponen industri yang dikembangkan selama ini kurang memperhatikan bahan baku kegiatan industri yang dikembangkan dapat dihasilkan dari sektor pertanian sehingga tekanan ekonomi telah meruntuhkan industri karena tidak mampu membeli komponen bahan baku impor. Petani sebagai komponen sumberdaya manusia dalam pengembangan agroindustri merupakan petani subsisten yang

belum memiliki kemampuan untuk mengantisipasi kompetisi pasar di samping rendahnya dukungan modal yang ada.

Kendala yang dihadapi adalah karakteristik petani Indonesia yang sebenarnya belum siap melakukan terobosan menghadapi pasar yang semakin kompetitif. Lahan usaha tani yang relatif sempit dengan dukungan modal yang marginal serta keterbatasan penguasaan teknologi pertanian merupakan permasalahan krusial yang menjadi kendala untuk menciptakan kondisi pertanian komersial sebagai tuntutan utama diberlakukan agroindustri. Petani pada umumnya masih berorientasi pada tanaman pangan guna memenuhi konsumsinya tanpa mempertimbangkan upaya meningkatkan pendapatan usaha taninya dengan mencoba jenis tanaman komersial. Pilihan ini semata-mata didasari ketakutan mengambil resiko gagal panen karena belum dikuasainya cara bertani yang lebih maju. Jenis tanaman yang diusahakan seharusnya lebih bervariasi dan diorientasikan guna memenuhi kebutuhan pasar dalam hal ini bahan mentah untuk menunjang kelancaran pengembangan industri.

Kekeliruan kebijakan yang telah berlangsung selama ini petani lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga berbagai kebijakan diterapkan kepada petani sebatas proyek yang pada dasarnya lebih menguntungkan pelaksana proyek. Proyek yang didefinisikan sebagai program peningkatan pangan dan pembangunan sektor pertanian mulai dari mekanisme, intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi bahkan eksensifikasi sepenuhnya meletakkan petani pada posisi tersubordinasi sehingga tidak memiliki peningkatan nilai tukar produksi pertaniannya (Kristiawan, 1997). Ekstensifikasi sebagai contoh pembukaan lahan sejuta hektarsampai saat ini hanya menyisakan permasalahan yang krusial karena tidak memberikan hasil yang optimal sesuai tujuan semula. Tujuan meningkatkan pendapatan petani melalui perluasan lahan pertanian serta penyediaan bahan pangan belum dapat terwujud bahkan sangat mengecewakan.

Sudah saatnya pola lama harus ditinggalkan demi lancarnya pemulihan ekonomi dan tegaknya ekonomi kerakyatan yang memposisikan petani sebagai motor penggerak.

Pemberdayaan petani sebagai pendekatan yang memposisikan petani sebagai subjek penggerak yang dinamis di sektor pertanian bukan untuk menggurui petani tetapi bagaimana seharusnya ditumbuhkan prakarsa petani untuk mampu menggali potensi yang tersedia sehingga petani dapat berperan sebagai subjek pembangunan pertanian bukan sebagai objek. Pemberdayaan petani dilakukan antara lain melalui revolusi cara produksi di sektor pertanian yakni mengarahkan petani agar tidak harus menggantungkan input kimiawi dalam usaha taninya serta menghidupkan lumbung pangan untuk mensiasati masa paceklik dan fluktuasi harga (Indra Ismawan, 2000).

Kesimpulan

Kebijakan pengembangan sektor pertanian perlu terus digalakkan dalam rangka peningkatan pendapatan penduduk terutama petani yang menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian. Pemerintah telah berusaha menaikkan harga sarana produksi pertanian yang meliputi pupuk dan pestisida yang kenaikannya justru tidak terkendali bahkan sering menjerat petani. Dampak secara langsung dari ketidakmampuan menyediakan sarana produksi pertanian adalah menurunnya kuantitas dan kualitas produk pertanian.

Pemberdayaan petani merupakan langkah yang seharusnya dilaksanakan guna mewujudkan pembangunan pertanian yang berpihak pada petani. Peningkatan produktifitas harus diikuti dengan peningkatan pendapatan petani serta peningkatan kepekaan petani untuk menerima setiap inovasi secara dinamis dan selektif. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan penguasaan teknologi tepat guna, optimalisasi peran lembaga swadaya kemasyarakatan atau perluasan lahan usaha tani yang memerlukan fasilitator, mediator, motivator sekaligus dinamisor dengan melibatkan petani sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi setiap program pengembangan sektor pertanian. Model pembangunan pertanian yang meminggirkan petani harus dihindarkan sehingga petani dapat secara mandiri dan aktif menentukan langkah-langkah usaha taninya secara tepat. Strategi peningkatan kesejahteraan petani agar terbebas

dari kemiskinan dan memiliki pendapatan yang semakin meningkat adalah pemberdayaan petani dengan kebijakan yang secara proposional mendorong kemajuan sektor pertanian yang memihak kepada petani.

Daftar Pustaka

- Austin, Janes E. (1991). *Agroindustrial Project Analysis Critical Design Factors*, John Hopkins University Press. Baltimore and London.
- Bernas, (1997). *273.653ha Areal Persawahan Hilang*, 21 Mar 1997. Yogyakarta.
-, (1997). *Harga Dasar Gabah Tidak Akan Naik Lagi*, 21 Feb 1997. Yogyakarta.
- Biro Pusat Statistik. (1994,1999). *Biro Pusat Statistik*. Jakarta
- Booth, (1991). Regional Aspects of Indonesian agricultural Growth, in Joan Hardjono (Ed) 1991. *Indonesia : Resources, Ecology and Environment*. Singapore : Oxford University Press.
- Departemen Pertanian, (1997). *Peluang Dan tantangan Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Agribisnis Di Indonesia*. Badan Agribisnis Departemen Pertanian. Jakarta.
- Didik J Rachbini. (1997). *Kesenjangan Cerminkan Struktur Politik Yang Ada*. Seminar Nasional Pikiran Alternatif Pengentasan Kemiskinan Dalam Dinamika Masyarakat Menjelang Abad 21. Ndalem Ngabean. Yogyakarta.
- Greg Soetomo, (1997). *Kekalahan Manusia Petani, Dimensi Manusia Dalam pembangunan Pertanian*. Kanisius. Yogyakarta.
- Gutomo Bayu Aji. (2000). *Dinamika Perubahan Struktur Agraris Dan Resistensi penduduk Pedesaan*. PPK-UGM : Yogyakarta.
- Indra Ismawan, (1997). *Kemarau panjang Dan Proletarisasi Petani*, Bernas 29 Agt 1997. Yogyakarta .
-, (1997). *Stagnasi Kesejahteraan petani*, Bernas 4 Des 1997. Yogyakarta.
-, (2000). *Tragedi Petani*, Bernas 21 Maret 2000. Yogyakarta.
- Hatta Sunanto, (1998). *Petani Sayang, Petaniku Malang*, Bernas 18 Feb 1998. Yogyakarta.
-, (1998). *Kemungkinan Krisis Pangan Dan Kelaparan*, Bernas 18 Maret 1998. Yogyakarta.
- Kristiawan, (1997). *Pola Komunikatif Petani Dalam Pembangunan*. Bernas 21 feb 1997: Yogyakarta.
- Murwati B Rahardjo, Sukardi Rinakit, (1996). Dalam Onny S. Priyono dan AMW Pranarka, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSOS. Jakarta.
- Onny S. Priyono dan A M W Pranarka, (1996). *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan mplementasinya*. CSIS: Jakarta.
- Pudjo Suharso, (1998). *KUD Dan Kemiskinan Di Pedesaan*. Bernas 13 Juli. Yogyakarta.
- Sri Adiningsih, (1997). *Periode Krusial, Kita Berada di persimpangan Jalan*, Bernas 31 Desember 1997. Yogyakarta.
- Todaro, M.P. (1998). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Uphadi, (1998). *Mencari Formula Kebijakan Pemberesan*. Bernas 13 Juni 1998. Yogyakarta.